



Volume 13 No. 2 Desember 2022

Page 214-227

Received: 21 Juli 2022

Revised Received: 03 November 2022

Accepted: 08 November 2022

Online Available: 29 Desember 2022

**DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA (DDII)
DAN EKSPANSI GERAKAN SALAFISME DI INDONESIA**

***THE INDONESIAN ISLAMIC PROPAGATION COUNCIL
(DDII) AND THE EXPANSION OF SALAFISM IN INDONESIA***

Musonif Fadli^{1,a)}, Dewandaru Ibrahim Senjahaji^{2,b)}

¹Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang

² Magister Sosiologi Universitas Jendral Soedirman

^{a)}*e-mail: musoniffadli@gmail.com*

^{b)}*e-mail: dewandaruibrahim1@gmail.com*

ABSTRAK

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) memiliki peran besar dalam penyebaran Salafisme di Indonesia. Sejak tahun 1980-an Salafisme melakukan ekspansi dakwahnya ke berbagai negara Muslim di dunia, salah satunya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literasi dan mengkomparasikannya dengan pengalaman penelitian yang pernah penulis lakukan, yang berkaitan dengan tema pada artikel yang ditulis. Para akademisi menyepakati jika DDII-lah yang telah berkontribusi memuluskan ekspansi dakwah Salafi tersebut. DDII bekerja sama dengan lembaga-lembaga Salafisme yang disponsori oleh Arab Saudi dalam melakukan penyebaran dakwahnya di Indonesia. Meskipun bila dilihat lebih jauh, DDII pada dasarnya bukan termasuk organisasi yang berpaham Salafisme (Salafi kontemporer). Namun, DDII pada akhirnya terlibat dan berperan penting dalam penyebaran Salafisme di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya sebuah titik temu kepentingan strategis yang sama antara keduanya. Adanya relasi tersebut menjadikan DDII bisa mendapat kekuatan secara politik maupun finansial untuk bergerak mengembangkan program dakwahnya di tengah rezim Orde Baru yang represif. Sementara Salafi

kontemporer juga mendapat keuntungan tersedianya akses dakwahnya ke berbagai penjuru Indonesia.

Kata Kunci: Dakwah Islamiyah; DDII; Politik; Salafisme

ABSTRACT

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia or DDII (The Indonesian Islamic Propagation Council) has a major role in the spreading of Salafism in Indonesia. Since 1980s Salafism has expanded the preaching activity (da'wah) to various moslem countries in the world; Indonesia is one of them. The method used in this study is literacy study to compare it with relevant research experience that the author has undergone. The academics agreed that it was DDII that had contributed to facilitate the preaching activity of Salafism in Indonesia. DDII collaborated with several Salafist institutions sponsored by Saudi Arabia to expand its preaching activity in Indonesia. Even though DDII was originally not based on Salafism as the basic thought (contemporary Salafi), it was eventually involved and played an important role in the spread of Salafism in Indonesia. It is because there is a similar strategic interest between DDII and Salafism. This kind of relationship gave possibility for DDII to gain political and financial strength to develop the preaching activity in the midst of the repressive New Order regime. Meanwhile, contemporary Salafi also benefit from the availability of access to the preaching activity to various regions of Indonesia.

Keywords: DDII; Islamic Da'wah; Politics; Salafism

1. Pendahuluan

Pergerakan Salafisme mulai memasuki Indonesia ditengarai sejak tahun 1980-an. Selama kurun waktu tersebut Arab Saudi berhasil menyebarkan pengaruh Salafisme terhadap berbagai negara-negara muslim di dunia. Salafisme ini berkembang masuk ke Indonesia melalui lembaga-lembaga Islam internasional yang disponsori oleh Arab Saudi. Arab Saudi merupakan aktor yang gencar dalam menyebarkan pengaruhnya baik secara politik maupun agama.

Gerakan Salafisme yang disponsori oleh Arab Saudi tersebut berhasil masuk ke Indonesia melalui gerakan filantropi dan lembaga pendidikan. Tercatat ada banyak aliran dana dari Arab Saudi yang sebagaimana diberikan melalui *Rabitat al-Alam al-Islami*

yang masuk ke Indonesia sebagai bantuan untuk pendirian berbagai masjid, sekolah-sekolah Islam, berbagai fasilitas sosial, juga bantuan untuk kegiatan-kegiatan dakwah (Hasan 2008, 42). Selain itu sebuah lembaga pendidikan yang memiliki orientasi kajian terhadap pengetahuan Islam dan bahasa Arab juga berhasil didirikan. Hal tersebut cukup masif menjadi aktor bagi penyebaran Salafi kontemporer di Indonesia.

Fenomena masuknya Salafisme di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang unik, mengingat Salafisme dapat masuk dan berkembang di Indonesia justru ketika Indonesia pada saat itu berada di bawah pemerintahan Orde Baru. Orde Baru yang cukup represif itu justru dapat menjadi pintu masuk bagi Salafisme. Hal tersebut menjadi

fenomena yang unik, tersebut selama pemerintahannya Orde Baru tidak memberikan sikap yang terbuka terhadap kebebasan berpolitik. Selain itu Orde Baru selalu berusaha menekan kemunculan berbagai macam ideologi lain selain ideologi yang dianut oleh negara.

Keberhasilan Salafisme dalam memasuki Indonesia dan menyebarkan ajarannya di tengah situasi rezim yang represif merupakan hal yang sangat luar biasa. Di situlah peran DDII kemudian tampak dan tidak dapat dipisahkan sebagai agen yang terlibat dalam penyebaran Salafisme di Indonesia. Hal tersebut juga seperti yang diakui oleh para kalangan akademisi, di mana masuknya Wahhabisme (Salafisme) di Indonesia tidak bisa dilepaskan oleh peran dari DDII (Wahid 2009, 78). Berkaitan dengan masuknya Salafisme di Indonesia dan peran DDII di dalamnya juga banyak disinggung oleh Noorhadisi Hasan (Hasan 2008). Meskipun begitu jika dilihat secara pandangan keagamaan dan ideologinya DDII tidak termasuk bagian dari Salafisme atau Salafi Kontemporer. Jika dilihat dalam konteks pandangan keagamaan antara DDII dengan Salafisme memang terdapat beberapa kesamaan, namun itu tidaklah mutlak. Secara ideologis keduanya tetaplah sebuah entitas kelompok yang memiliki pemikiran yang berbeda.

DDII adalah warisan modernisme Islam di Indonesia yang merupakan penerus ideologi Partai Masyumi. Masyumi sendiri tidak lain adalah bentuk gabungan dari berbagai macam kelompok Islam yang ada di Indonesia

saat itu. Dalam pendiriannya Masyumi disokong oleh berbagai organisasi Islam, namun pendukung terbesarnya adalah Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (Maarif 1985, 112). Fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam tubuh Masyumi sendiri terdapat unsur kelompok Islam yang hidup di Indonesia. Begitu juga dengan DDII yang merupakan transformasi Masyumi yang menjelma dalam organisasi dakwah. Namun tidak dapat dipungkiri ide tentang modernisme lebih banyak berpengaruh dalam DDII mengingat mereka para pendiri DDII mayoritas adalah tokoh-tokoh Masyumi berpaham modernis seperti; Mohammad Natsir, Buya Sutan Mansyur, Syafruddin Prawiranegara, Burhanddin Harahap, Prawoto Mangkusasmito, Kasman Singodimejo, Mr. Mohammad Roem, K.H. Faqih Usman, K.H. Taufiqurrahman, KH Hasan Basri, Yunan Nasution, A.R Baswedan, dan sebagainya.

Dalam konteks pemikiran dan pandangan keagamaan, rujukan terhadap pemikiran Mohammad Natsir dalam tubuh DDII masih begitu terasa hingga saat ini. Hal serupa juga seperti yang terlihat dalam DDII di Banyumas dimana mereka masih sangat kuat memegang tradisi dan pemikiran ideologi Masyumi serta Mohammad Natsir. Berdasarkan perjumpaan dengan DDII di Banyumas, tidak dapat dijustifikasikan jika DDII secara ideologis merupakan bagian dari Salafisme kontemporer meskipun DDII pernah berperan dalam penyebaran Salafisme kontemporer di Indonesia (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia 2022).

2. Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan studi literasi dan mengkomparasikannya dengan pengalaman penelitian yang pernah penulis lakukan berkaitan dengan tema artikel ini. Tulisan ini merupakan sebuah kajian dengan tema tentang Islam Politik. Selain berbasis pada observasi lapangan yang pernah penulis lakukan, penulisan artikel ini juga dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan tema yang sesuai dengan topik yang diangkat. Literatur yang digunakan dalam menyusun artikel ini terdiri dari buku, jurnal, majalah, website, yang semuanya berkaitan dengan topik Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Ekspansi Gerakan Salafisme di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Ajaran Salafisme

Salafi merupakan sebuah term yang bersifat jamak. Salafisme saat ini oleh sebagian akademisi digunakan untuk mengidentifikasi kelompok yang merujuk pada ajaran Wahhabisme. Wahhabisme sendiri merupakan doktrin ajaran Islam yang bersumber pada gagasan Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab (1703-1792). Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab memelopori gerakan Salafisme bertujuan untuk menghidupkan kembali keyakinan, praktik, dan tradisi murni Islam generasi terdahulu (*salaf*), hal tersebut dilakukan dengan bantuan dan dukungan penguasa Arab Saudi (Krismono 2017, 176).

Sejauh ini Wahhabisme dikenal sebagai dasar keagamaan yang dianut oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, mereka para penganut Wahhabisme sendiri tidak mau disebut dirinya sebagai “Wahhabi.” Mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai Salafi atau *salaf*.

Salaf secara etimologi berasal dari sebuah term yaitu, *salafus shalih* yang berarti terdahulu. Salafus saleh dimaksudkan sebagai orang-orang yang merujuk atau mengikuti ajaran Islam kepada mereka orang-orang yang terdahulu. Dalam pandangan yang lebih luas Salafi atau pun *salafus shalih* sendiri adalah sebuah konsep yang dianut oleh semua golongan Islam beraliran Sunni. Jadi pada dasarnya semua kelompok Islam yang termasuk dalam golongan Sunni mereka semua mengakui dirinya sebagai *salaf*.

Salafisme menjadi sebuah term baru yang digunakan oleh para akademisi untuk membedakan fenomena kelompok Salafi baru yang muncul pada abad-20. Salafisme atau yang Noorhaidi Hasan (Hasan 2008) katakana sebagai Salafi kontemporer, bukanlah merupakan gerakan baru. hal tersebut adalah bentuk baru atau sebuah manifestasi baru dari ajaran Wahhabisme. Demikian pula seperti yang diutarakan oleh Sholehudin di mana ia menyebut pada dasarnya Salafi kontemporer yang ada saat ini tidak lain merupakan gerakan Hambalisme, atau gerakan Ibnu Taimiyah, gerakan kaum ahli hadits, atau gerakan Wahabisme (Sholehiddin 2013, 67).

Salafisme atau Salafi kontemporer merupakan kelompok yang berjejaring secara internasional. Di bawah peran Pemerintah Saudi, kelompok tersebut melakukan ekspansi

untuk terus menyebar keberbagai negara-negara Muslim di dunia. Mereka memiliki kecenderungan secara umum untuk memaknai ajaran Islam secara tekstual. Din Wahid membagi Salafisme di Indonesia menjadi tiga kelompok: Salafi Puritan, Salafi Haraki, dan Salafi Jihadi (Wahab 2019, 224). Salafi Puritan merupakan Salafi yang hanya berorientasi pada dakwah semata. Salafi Puritan juga dikenal memiliki ketaatan terhadap pemerintah. Salafi Haraki sering kali disebut juga sebagai Salafi Politik, hal tersebut dikarenakan Salafi Haraki mempunyai pandangan untuk ikut terlibat dalam bidang politik. Salafi Haraki juga berkenan untuk mengikuti kontestasi politik seperti pemilu. Bagi mereka pemilu hanyalah bentuk ijtihad semata yang tidak masalah untuk diikuti. Terakhir, Salafi Jihadi adalah kelompok Salafi yang paling ekstrem. Salafi Jihadi meyakini suatu gagasan tersendiri tentang pemeritahan yang seharusnya berdasarkan ajaran agama Islam. Dalam upaya mewujudkan gagasannya tersebut Salafi Jihadi mengahalkan penggunaan kekerasan.

Secara garis besar terdapat beberapa doktrin ajaran Salafi kontemporer yang secara umum dijumpai. *Pertama*, Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam hal ini adalah berusaha menolak segala macam bentuk interpretasi terhadapnya. Salafisme melakukan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah secara literal dan tidak menempatkan kemampuan akal untuk menafsirkannya. *Kedua*, Tauhid yang menerapkan tiga pondasi yaitu, *tauhid uluhiyah*, *tauhid rububiyah* dan

tauhid al-asma' wa al-shifat. Tauhid merupakan inti dari Salafisme. Ketahuhan tersebut merupakan tauhid yang memandang Allah S.W.T penguasa satu-satunya penentu kehidupan dan hukum yang ada di dunia. *Ketiga*, *Ahlussunnah wal Jamaah*. Sebagaimana golongan Sunni lainnya Salafisme juga berpegang pada *Ahlussunnah wal Jamaah*, Salafisme senantiasa menrjukan pada golongan yang terdahulu *Salafus Salehd* engan tetap menjaga kemurnian ajarannya. *Keempat*, *Al-wala' wal barra'*. *Al-wala' wal barra'* berarti persekutuan dan permusuhan. Salah satu yang khas dari Salafisme adalah memegang doktrin tersebut di mana mereka akan memuliakan dan menolong sesama umat Islam (kelompoknya), namun akan menjauhi dan menghinakan mereka yang di luar Islam (kelompoknya). *Kelima*, Menolak *Hizbiyah (sektarian)*. Salafisme pada dasarnya menolak dakwah yang bersifat sektarian, oleh karena itulah dakwah mereka benar-benar sangat luas dan berlangsung secara terus menerus. *Keenam*, *Hakimiyah (Kedaulatan Tuhan)*. *Hakimiah* lebih lekat dalam pemahaman Salafi Jihadi yang menempatkan *hakimiah* sebagai salah satu bagian dari ketauhidan. *Hakimiah* meyakini bahwa seuah hukum dunia dan pemerintahan di dunia adalah kekuasaan Allah, maka segalanya harus berdasar hukum Allah. *Ketujuh*, *Jihad*. Jihad ini memiliki klasifikasi dan beberapa makna. Sebagian Salafi seperti Salafi Jihadi meyakini adanya jihad yang harus dilakukan untuk membela agama Allah dengan berdasar pemahaman *hakimiyah* tersebut (Sholehiddin 2013).

Gerakan Salafi di Indonesia dapat ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan reformis Islam sejak abad-20. Hal tersebut dapat ditandai dengan pecahnya gerakan Padri di Sumatra Barat. Gerakan tersebut berawal atau dibawa oleh orang Indonesia yang kembali setelah melakukan ibadah haji di Mekkah. Gagasan yang nantinya memunculkan reformasi Islam ini kemudian dikuatkan dengan penyebaran Salafisme Muhammad Abduh dan Rashid Rida. Kondisi tersebut kemudian mengilhami munculnya sejumlah organisasi-reformis modernis seperti gerakan Muhammadiyah, al-Irsyad, dan Persatuan Islam di seperempat abad-20. Gerakan-gerakan tersebut aktif menyerukan kembali kepada Qur'an dan Sunnah serta meninggalkan kebiasaan tradisional seperti bid'ah, takhayul dan khurafat. Munculnya organisasi reformis-modernis tersebut juga menentang kontrol ulama tradisional terhadap korpus keagamaan yang kemudian direspon oleh kiai-kiai dan ulama-ulama dengan mendirikan gerakan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 (Hasan 2008).

3.2 Ideologi DDII

DDII adalah organisasi dakwah Islam di Indonesia yang didirikan pada sekitar tahun 1967 oleh Muhammad Natsir beserta para mantan pemimpin Masyumi lainnya. Salah satu pemicu berdirinya organisasi DDII adalah berbagai jalan buntu politik yang menjadi penghalang bagi mereka untuk dapat kembali ke ranah politik. Khususnya hal-hal yang berkaitan tuntunan mereka untuk merehabilitasi Masyumi dan penerapan Piagam Jakarta. Sederhananya keputusan para

mantan pemimpin Masyumi untuk mendirikan DDII adalah sebuah pilihan yang sangat strategis untuk meloloskan diri dari kebuntuan politik sekaligus menghindari tekanan dari Soeharto (Hasan 2008).

DDII dapat dikatakan merupakan transformasi Partai Masyumi, yang melepaskan dirinya dari tempurung politik praktis. Meski begitu bukan berarti DDII sama sekali tidak mau menyentuh ranah politik. Hal tersebut seperti yang diucapkan oleh pendirinya Mohammad Natsir terkait didirikannya DDII, Natsir mengatakan bahwa “sebelumnya kita melakukan dakwah melalui politik, tapi sekarang kita menjalankan politik melalui dakwah” (Fajar Riadi 2013). Kalimat yang dilontarkan Natsir tersebut seolah menyiratkan sebuah keterkecangan Natsir terhadap rezim yang membatasi kelompok Islam dalam berpolitik, namun ia tetap menunjukkan semangatnya meski saat itu hanya dapat berjuang melalui jalur dakwah.

Dalam konteks pemikiran ke-Islaman DDII hingga masih merujuk pada pemikiran Masyumi dan lebih spesifik merujuk kepada Mohammad Natsir. Berdasarkan studi tentang DDII di Banyumas terlihat jika ingatan mereka terhadap pemikiran-pemikiran Mohammad Natsir masih begitu melekat. Mereka para anggota DDII di Banyumas sebagian besar merupakan kalangan menengah terdidik dan banyak dari mereka merupakan para akedemisi di berbagai kampus yang tersebar di Banyumas. Fenomena tersebut sangat menampilkan sosok seorang Natsir yang merupakan seorang intelektual Muslim yang lekat dengan pemikiran Islam

modern. Meskipun Natsir adalah seorang berpegang teguh pada ke-tauhuhidan, namun Natsir juga adalah seorang yang menjunjung tinggi akal manusia. Sebagai seorang intelektual Natsir juga mengedepankan pemahaman agama yang juga melibatkan peranan akal pikiran. Natsir menegaskan jika agama Islam adalah agama yang menghormati akal manusia, selain itu Natsir juga menyerukan agar umat Islam senantiasa menuntut ilmu dan menyeru agar umat Islam tidak taklid-buta kepada sesuatu yang belum diperiksa terlebih dahulu (Natsir 1973, 145–58).

Dalam sisi politik DDII tak seperti Masyumi yang pernah memperjuangkan formalisme Islam dalam negara seperti yang terjadi pada sidang Majelis Konstituante 1956-1959. Pada sidang Konstituante Natsir sempat menolak Pancasila dan menghendaki adanya dasar negara Islam di Indonesia, Pemikiran Natsir pada saat itu pun sekaligus menjadi sikap Partai Masyumi (Munawir Sjadzali 1993). Fenomena dukungan terhadap dasar negara Islam pada majelis Konstituante pun tidaklah serta merta menjadi sebuah justifikasi terhadap Masyumi jika ia sepenuhnya bersandar pada formalisme agama. Mengingat pada saat itu bukan hanya Masyumi saja yang mendukung dan memperjuangkan dasar negara Islam bagi Indonesia, termasuk seluruh fraksi partai Islam pada saat itu.

Fenomena adanya dorongan seluruh fraksi Islam kepada dasar negara Islam didasari oleh adanya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada saat itu menjadi rival mereka untuk bisa tetap hidup di dalam negara

Pancasila. Oleh karena itulah fraksi Partai Islam berusaha merubah dasar negara menjadi Islam atau setidaknya mempertegas kembali Pancasila yang dimaknai sesuai dengan ajaran agama Islam. DDII tidak memiliki pandangan tentang formalisme agama dalam negara, DDII lebih menekankan pada substansionalisme agama dalam kenegaraan. Nilai-nilai Islam harus terus ada dalam kehidupan kenegaraan dan DDII juga mendukung agar kebijakan negara mampu mengakomodir kepentingan umat Islam.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DDII secara jelas tertulis mengenai tujuan dalam Pasal 4 AD/ART DDII adalah, “Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami dalam NKRI yang kuat dan sejahtera.” Masyarakat Indonesia yang Islami dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menunjukkan jika DDII tidak memiliki pandangan formalisme agama dalam negara atau mendasarkan agama secara formal kedalam negara. Hal tersebut juga seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Siddik Ketua DDII Pusat Periode 2015-2020, “NKRI itu harga mati setelah urusan agama. Buat kita, NKRI tidak ada yang lain.” (Franoto, n.d.). Jika ditelusuri dari sejarahnya pun adanya konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah prakarasa Natsir dalam mosi integralnya demi menyeleamatkan Indonesia dari perpecahan.

Dalam ranah aqidah keagamaan, DDII menolak adanya sinkreteisme agama seperti yang dilakukan oleh kalangan Islam tradisional. DDII menolak adanya *bid'ah*,

khufarat, dan *syirik*. Penolakan terhadap ketiga hal tersebut juga menjadi salah satu orientasi dakwah mereka. DDII juga aktif berdakwah untuk mencegah adanya Kristenisasi dan juga menyerukan anti Syiah. Selain itu DDII berdakwah dengan menyebarkan kader-kadernya ke berbagai masjid sampai ke pelosok daerah. DDII melalui jaringan da'I dan masjid tersebut menyebarkan gagasan-gagasan Ikhwanul Muslimin maupun Jama'ati Islami. Hal tersebut diwujudkan oleh tulisan-tulisan para tokoh ideolog Islamis yang cukup berpengaruh seperti Qutb, Maududi, Banna, Sayyid Hawwa, dan juga Mustafa al-Siba'I (Hasan 2008).

3.3 DDII dan Dakwah Salafisme di Indonesia

Ekspansi gerakan Salafisme merupakan sebuah bentuk penyebaran atau perluasan gagasan kelompok Salafisme ke seluruh penjuru dunia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam sekaligus sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar tidak luput dari gerakan tersebut. Hal tersebut juga terjadi berkaitan dengan menguatnya pengaruh Arab Saudi pada tataran politik global. Arab Saudi dengan kekuatannya berusaha memposisikan dirinya sebagai pusat bagi dunia Islam.

Arab Saudi merupakan sebuah negara dengan bentuk pemerintahan monarki absolut yang menempatkan Islam sebagai dasar konstitusinya. Namun dalam hal ini Wahhabisme lebih tepat dikatakan sebagai dasar ajaran Islam di Arab Saudi. Ruh Wahabbisme inilah yang sampai hari ini menjelma dalam pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Wahhabisme sangat berpengaruh

terhadap penetrasi politik keluarga Saud, hal tersebut diperkuat dengan adanya identifikasi secara politis ajaran Wahhabisme yang memiliki pengaruh kuat di dalam masyarakat kemudian ia terapkan sebagai aliran Islam yang resmi dianut oleh negara (Kartini et al. 2019, 18).

Manuver politik Arab Saudi dalam tataran percaturan politik global dapat dilihat dari kemunculannya hingga saat ini. Sejak didirikannya oleh Abdul Aziz Ibn Saud Arab Saudi selalu memainkan pengaruhnya dikalangan dunia Islam. Arab Sudi seolah menempatkan dirinya sebagai pemimpin diantara negara-negara Islam. Sejak tahun 1950-an Arab Sudi cukup gencar melakukan penyebaran Wahabisme di berbagai negara Islam. Penyebaran pengaruhnya makin gencar dilakukan untuk mengkonter Mesir yang juga berusaha melebarkan pengaruhnya ke negara-negara Islam dengan membentuk Pan-Arabisme.

Selama periode tersebut Arab Sudi telah menyponsori pendirian berbagai lembaga lembaga Islam seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang didirikan sebagai pemersatu kebijakan diantara negara-negara Islam. Selain itu, Arab Saudi juga mendirikan *Rabitat al-Alam al-Islami* (Liga Dunia Islam) ditujukan untuk memperluas pengaruh Saudi Arabia di kalangan negara-negara Muslim. Sebuah momentum kenaikan harga minyak pada tahun 1970 juga telah membuka peluang besar Arab Saudi karena memiliki keuntungan yang makin besar dari penjualan minyak. Mendapatkan banyak limpahan rejeki dari minyak tersebut Arab

Saudi kemudian menciptakan sistem bantuan finansial bagi mereka yang mendukung gerakan Wahhabi (Muzammil 2013, 219). Hal tersebut membuka peluang bagi Arab Saudi untuk lebih memainkan gerakan filantropiknya di berbagai negara untuk menyebarkan pengaruhnya.

Rabitah al-Alam al-Islami menjadi salah satu agen filantropik Arab Sudi di negara-negara Muslim. Kemunculan dari Rabitah al-Alam al-Islami memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap perluasan pengaruh Saudi Arabia yang secara terus-menerus menggapai momentum semenjak awal tahun 1970-an. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari kesuksesan Saudi Arabia dalam mencapai posisi yang semakin penting di dalam dunia Islam, terutama di Timur Tengah, yang merupakan akibat dari kekalahan-kekalahan negara-negara Arab di dalam perang Arab-Israel pada sekitar tahun 1967. Posisi Saudi Arabia semakin menjadi krusial setelah harga minyak dunia semakin melambung. Hal tersebut menjadi sebuah peristiwa yang semakin memberikan keuntungan-keuntungan ekonomi bagi Saudi Arabia. Saudi Arabia untuk dapat semakin menyebarkan pengaruhnya meminta Rabitah al-Alam al-Islami menjadi salah satu agen filantropiknya di negara-negara Muslim untuk bertugas memberikan bantuan seperti beasiswa, pembangunan masjid, sekolah-sekolah Islam, pembangunan fasilitas-fasilitas sosial, serta untuk dapat membiayai kegiatan-kegiatan dakwah dari organisasi-organisasi Islam yang tersebar di seluruh penjuru dunia (Hasan, 2002, hal. 42)

Selain itu ekspansi pengaruh Arab Saudi juga lebih kuat setelah adanya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Revolusi yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini berhasil menggulingkan kekuasaan sebelumnya, yaitu Rezim Shah. Akibat dari revolusi tersebut adalah dijadikannya Syiah sebagai ideologi resmi negara di Iran. Hal tersebut membuat negara-negara Arab terutama Arab Saudi khawatir jika revolusi Iran menjadi momentum penyebaran Syiah di dunia Islam (Kartini et al. 2019).

Di Indonesia adanya semangat ekspansi gerakan Salafisme disambut baik oleh DDII. DDII memfasilitasi kegiatan dakwah mereka di Indonesia pada saat itu. Meski iklim politik di Indonesia saat itu kurang mendukung adanya adanya pergerakan ideologi dan kelompok tertentu akibat rezim yang cukup represif. Namun, dengan melalui kerjasama dengan DDII penyebaran Salafisme pada akhirnya dapat berjalan dengan cukup masif ke berbagai tempat di Indonesia.

Pada masa Orde Baru ruang politik bagi kelompok Islam kurang begitu mendapatkan tempat. Orde Baru berusaha memainkan dominasi politiknya terhadap kelompok Islam karena dianggap dapat menjadi kekuatan yang mengancam bagi kekuasaan. Sebagian kelompok Islam khususnya memilih untuk tidak terlibat dalam dinamika politik praktis. Hal tersebut seperti yang terjadi pada sebagian kalangan Islam yang eks-Masyumi.

Pasca peristiwa G30S/PKI, umat Islam termasuk pada awalnya sempat dimobilisir oleh Orde Baru untuk turut menumpas Partai

Komunis Indonesia (PKI) (Solahudin 2011, 82–84). Namun, saat kondisi telah kembali kondusif kelompok Islamlah yang kemudian dijegal pergerakan politiknya oleh pemerintah. Permintaan para tokoh eks-Masyumi untuk merehabilitasi kembali Masyumi sebagai partai politik ditolak oleh Orde Baru. Akibat penolakan tersebut para eks-Masyumi kemudian masuk kedalam partai politik baru yang diberikan oleh Orde Baru, yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Namun tak lama setelahnya mereka juga tak luput dari penjagalan yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru. Setelah para eks-Masyumi masuk dan berhasil menguasai kepemimpinan Parmusi, pemerintah pusat mencegahnya dengan menolak kepemimpinan baru Parmusi yang dipegang oleh Muhammad Roem (Fajar Riadi 2013). Peristiwa tersebut membuat para eks-Masyumi kecewa dan memilih melakukan perjuangan menggunakan jalur dakwah.

Mohammad Natsir yang merupakan pendiri DDII merupakan salah satu orang yang gigih menyerukan hal tersebut. Pilihannya untuk mendirikan DDII karena ia merasa kelompok Islam mulai tak mendapat tempat pada masa Orde Baru. Pada tahun 26 Februari 1967 Mohammad Natsir mengumpulkan para eks-Masyumi dan berbagai unsur kelompok keagamaan untuk mendirikan sebuah organisasi yang berjuang melalui dakwah (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia 2022). Dalam pendirian DDII natsir menyerukan jika saat ini adalah saatnya berpolitik lewat dakwah bukan berdakwah lewat politik. Hal tersebut terus dilakukan oleh DDII hingga pada

akhirnya membangun jejaring dengan jaringan Salafisme yang disponsori oleh Arab Saudi.

Dalam upaya penyebaran Salafisme di Indonesia DDII dapat menjadikan ekspansi yang dilakukan bekerja secara sistematis. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan peran DDII dalam memfasilitasi ekspansi Salafisme di Indonesia. Melalui DDII dana bantuan Arab Saudi lewat berbagai lembaga-lembaga seperti Rabitat al-Alam al-Islami dapat masuk ke Indonesia. Sebuah lembaga pendidikan yang disponsori oleh Arab Saudi pun dapat berdiri di Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut bernama Lembaga Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA) pada tahun 1981 (Hasan 2008). Melalui lembaga pendidikan tersebut DDII dapat menjangkau pelajar Muslim di Indonesia dari berbagai daerah. Selain itu, sejak tahun 1980-an DDII juga banyak memberikan akses beasiswa kepada pelajar Indonesia untuk mengenyam pendidikan di beberapa perguruan tinggi di Timur Tengah (Hasan 2002). Mereka yang telah selesai belajar dari Timur Tengah kemudian memiliki pandangan ke-Islaman baru dan saat mereka kembali ke Indonesia mereka aktif sebagai bagian dari agen penyebaran Salafisme di Indonesia.

Para anggota DDII seperti Natsir juga memiliki jejaring dengan para mahasiswa di berbagai kampus-kampus di Indonesia. Melalui jejaring tersebut DDII mampu menyebarkan dakwahnya ke dalam dunia kampus. Dalam dunia kampus DDII menjadi pendukung bagi berkembangnya Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Imaduddin Abdurrachim yang salah satu aktifis Masjid

Salman, Institute Teknologi Bandung (ITB) (Hasan 2008), disebutkan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Mohammad Natsir. Selain itu Melalui Imaduddin Abdurachim Mohammad Natsir juga dapat masuk kedalam organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia pada waktu itu, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Imaduddin Abdurachim bersama Endang Saefudin Anshari juga disebutkan membangun sebuah pelatihan-pelatihan menggunakan metode *tarbiah*. Bahkan pelatihan yang diperuntukan bagi mahasiswa tersebut, menurut Martin Van Bruinessen lebih sistematis dan disiplin dari pada Latihan Kader (*basic training*) di organisasi mereka yaitu HMI (Martin Van Bruinessen 2013, 348). Melalui aktifisme dikampus inilah benih-benih Salafisme kemudian lahir melalui gerakan-gerakan dakwah kampus yang awalnya dikenal dengan gerakan *tarbiyah*. Gerakan ini aktif melakukan kajian-kajian diskusi tentang ke-Islaman yang disebut sebagai *halaqa*.

Selain itu, bantuan dana dari berbagai lembaga Islam Internasional juga disalurkan untuk pendirian masjid-masjid diberbagai pelosok tanah air. Mereka para kader-kader muda yang telah mendapatkan pengetahuan baru yang bercorak Salafisme banyak menjadi pada pendakwah yang disebar diberbagai penjuru Indonesia. melalui berbagai lini tersebutlah pada akhirnya Salafisme pada akhirnya dapat tersebar keberbagai wilayah di Indonesia. Namun selama masa pemerintahan Orde Baru karena situasi tidak mendukung mereka melakukan dakwah secara tertutup. Reformasi 1998 pada akhirnya menjadi momentum besar bagi munculnya berbagai

identitas kelompok Salafi yang terbagi menjadi berbagai organisasi.

3.4 Sebuah Titik Temu Kepentingan

Tampilnya DDII sebagai bagian dari penyebaran Salafisme di Indonesia bukan berarti DDII memiliki ideologi yang sepenuhnya sama dengan Salafisme. Dalam ritus kehidupan keagamaannya para kader-kader DDII hingga saat ini menunjukkan pola ideologi dan pemikiran ke-Islamanannya yang masih berpegang teguh kepada garis ideologi Masyumi dan juga pemikiran Mohammad Natsir. Hal tersebut terlihat juga pada kader DDII yang ada di Banyumas.

Secara garis ideologi tidaklah dapat disamakan antara DDII dengan Salafisme. DDII tetap menjadi sebuah organisasi dakwah yang merupakan pewaris ideologi Masyumi. Fenomena keberadaan DDII menjadi bagian dari penyebaran Salafisme di Indonesia merupakan suatu fenomena yang menarik. Kerana DDII sendiri pada dasarnya bukanlah bagian dari Salafisme. Bahkan hingga saat ini pun secara keorganisasian mereka adalah kelompok yang saling terpisah dengan Salafi kontemporer. Dalam beberapa corak keagamaan DDII memang memiliki kesamaan dengan pandangan Salafisme, namun hal tersebut tidak secara keseluruhan. Beberapa analisis penulis ungkapkan untuk melihat terciptanya hubungan antara DDII dengan Jejaring Salafisme Internasional yang disponsori oleh Arab Saudi, sehingga DDII ikut terlibat dalam ekspansi Salafisme di Indonesia.

Pertama, Relasi DDII dengan lembaga-lembaga Islam Internasional tidak

dapat dilepaskan dari peran Mohammad Natsir. Mohammad Natsir yang sebelumnya adalah seorang ketua Partai masyumi yang sekaligus pernah menjabat sebagai perdana menteri sudah memiliki modal jejaring dikalangan lembaga-lembaga Muslim internasional. Sejak tahun 1950-an Natsir telah berjejaring dengan tokoh-tokoh Muslim dunia yang terkenal seperti Sayyid Abu a'la Mawdudi dari Pakistan, juga Sayed Abu Hasan An-Nadwi dari India (Ricklefs 2013, 278), selain itu Natsir juga dikenal dekat dengan pemimpin-pemimpin Muslim di negara Arab. Jejaring tersebutlah yang membuat DDII dapat menjangkau jaringan Islam Internasional.

Kedua, Situasi politik Orde Baru yang represif terhadap gerakan masyarakat sipil khususnya kepada Umat Islam. Represifitas rezim Orde Baru membuat sempitnya ruang gerak DDII. Dakwah adalah hal yang paling memungkinkan untuk melakukan perjuangan itu pun masih harus waspada karena pemerintah selalu melakukan pengasawan yang dilakukan oleh setiap organisasi yang ada. Puncaknya ketika DDII mulai mencoba untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru melalui harian Abadi. Secara perlahan DDII mulai melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan Soeharto. Namun, sebagai akibatnya harian Abadi pada akhirnya diberangus oleh pemerintah pada tahun 1974 (Hasan 2008). Represifitas pemerintah tersebut sangat dimungkinkan menjadi salah satu faktor bagi DDII untuk lebih mengembangkan jejaring kekuatan dengan aktor lembaga-lembaga Islam

Internasional. Membangun Jejaring dengan Islam Internasional seperti lembaga Salafi yang disponsori oleh Arab Saudi, secara tidak langsung dapat membangun posisi tawar secara politik bagi DDII terhadap rezim Orde Baru yang represif.

Ketiga, dukungan finansial menjadi faktor pendukung bagi program dakwah DDII ditengah rezim yang tidak memberikan dukungan. Adanya dukungan finansial terlebih dalam konteks situasi politik yang tidak menguntungkan dapat menjadi modal untuk melakukan gerakan dakwah. Dalam perjuangannya DDII telah dapat memberikan bantuan ke berbagai aktifitas dakwah dan ke-Islaman di Indonesia. Adanya dukungan finansial tentunya menjadi sebuah kesempatan bagi DDII dalam berjejaring dengan lembaga-lembaga dakwah Salafi Internasional. Karena dapat menopang program-program dakwah yang dilakukannya. Bekaitan dengan bantuan finansial Noorhaidi Hasan mencapai jika DDII menerima banyak bantuan dari Arab Saudi melalui berbagai organisasi seperti, Hai'at al-Ighatsah al-Islamiyah al-'Alamiyyah (Organisasi bantuan Islam Internasional), al-Majlis al-'Alami li'l-Masajid (Dewan Masjid Dunia), al-Nadwat al-'Alamiyyah li al-Shahab al-Islami (Organisasi Pemuda Muslim Dunia), dan Lajnat Birr al-Islami (Panitia Derma Islam) (Hasan 2008).

Keempat, adanya perbedaan Ideologis yang tidak terpaut jauh di antara keduanya. Meskipun berbeda namun secara aqidah DDII masih memiliki akar ideologis yang sama. Sebagai organisasi yang masih berada dalam lingkup gerakan pembaharuan Islam, DDII

masih memiliki titik temu ideologis yang sama dengan Salafi awal yang muncul pada era Pan-Islamisme. Dalam beberapa hal DDII masih memiliki pengaruh pemikiran dari para tokoh Islam pada era tersebut termasuk Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab. Namun DDII tidak melahap sepenuhnya secara literal dan mutlak, jika diruntut dari pemikiran Natsir maka ia juga mengadopsi banyak pemikir-pemikir Islam lainnya. Adanya titik temu persamaan ideologis tersebutlah yang memungkinkan DDII kemudian berpeluang menjadi menjalin kerjasama dengan jejaring Salafisme Internasional. Posisi tersebut tentunya tidak akan diberikan kepada kelompok Islam yang memiliki ideologi yang sangat berbeda atau bahkan bertolak belakang seperti Islam Tradisionalis.

Kelima, adanya kesaamaan tujuan dalam ranah gerakan. Adanya tujuan yang sama merupakan hal penting bagi terbangunnya sebuah kerjasama antara dua subjek. Adanya kesamaan tujuan dalam ranah praksis antara DDII dan Salafi kontemporer adalah, adanya persamaan bergerak dalam bidang dakwah dan gerakan *tarbiah*, adanya beberapa konsen pada isu yang sama seperti penolakan terhadap Syiah dan juga mencegah adanya kristenisasi atau permurtadan. Selain itu DDII juga aktif memerangi *bid'ah*, *syirik*, dan *khurafat*, dimana hal tersebut juga sejalan dengan apa yang gagas oleh Salafisme berkaitan dengan pemurnian Islam.

Kesatuan DDII dalam penyebaran dakwah Salafisme di Indonesia adalah kesatuan yang bersifat relatif. Kesatuan yang terjadi adalah adanya posisi strategis yang

sama dimana keduanya sama-sama dapat mengambil keuntungan dari kerjasama tersebut. DDII diuntungkan dengan diperolehnya kekuatan baik secara politik maupun secara finansial yang bisa digunakan untuk mengembangkan kegiatan dakwahnya sampai keberbagai pelosok. Pada sisi yang lain lembaga-lembaga Salafi kontemporer juga diuntungkan dengan adanya aktor yang dapat membantu memberikan akses dan juga menyebarkan ajaran Salafisme di Indonesia.

4. Simpulan

Relasi antara Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dengan Salafi Kontemporer dalam melakukan ekspansi dakwahnya dapat dilihat hasilnya pasca keruntuhan Orde Baru. Gerakan dakwah pada masa Orde Baru bergerak menggunakan metode *tarbiyah* menggunakan sistem kajian kecil yang bernama *halaqa*. Meski kecil namun gerakan tersebut masif dan dapat menyebar di berbagai tempat sehingga pada era keterbukaan politik berbagai kelompok berlatarbelakang Salafi bermunculan.

DDII memiliki peran besar terhadap masuknya Salafisme di Indonesia, karena melalui DDII lah Salafisme mendapatkan akses masuk ke Indonesia. Meskipun DDII memiliki peran terhadap penyebaran Salafisme di Indonesia, secara ideologis DDII bukanlah bagian dari Salafi kontemporer itu sendiri. DDII adalah perwaris ideologi Partai Masyumi yang sampai saat ini masih berkiblat pada pemikiran-pemikiran Muhammad Natsir.

Keterlibatan DDII menjadi penyebaran Salafisme di Indonesia adalah sebuah titik temu

yang bersifat relatif. Iklim politik Orde Baru yang tidak memberikan kebebasan terhadap gerakan sipil, memberikan dorongan untuk mencari kesempatan-kesempatan yang dapat diambil demi membantu program dakwahnya. Adanya kesamaan-kesamaan kepentingan dan tujuan tersebutlah yang membuat pada akhirnya antara DDII dan Salafi kontemporer dapat bekerja sama dan membangun program dakwahnya bersama. DDII diuntungkan dengan adanya kekuatan politik dan finansial yang membuatnya bisa bergerak melakukan program dakwahnya. Sementara para sponsor Salafi diuntungkan dengan tersebarnya Salafisme di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia. 2022. "Profil Dewan Da'wah." Dewandawah.Com. 2022. <https://dewandawah.com/dewan-dawah-islamiyah-indonesia-2/>.
- Fajar Riadi. 2013. "Menyeru Dakwah, Menebar Jihad." *Majalah Historia*, 2013.
- Franoto. n.d. "Wawancara: Ketua Umum DDII Bicara Islam, Negara, & Demokrasi." Tempo.Co.
- Hasan, Noorhaidi. 2002. "Faith and Politics: The Rise of the Laskar Jihad in the Era of Transition in Indonesia." *Indonesia* 73: 149–69. <https://doi.org/10.2307/3351472>.
- . 2008. *Laskar Jihad: Islam Militansi, Dan Pencarian Identitas Di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakar: LP3ES.
- Kartini, Indriana, Muhammad Fakhry Ghafar, Nostalgawan Wahyudi, M. Hamdan Basyar, and Dhurorudin Mashad. 2019. *Politik Islam Arab Saudi, Kuwait, & Uni Emirat Arab*. Jakarta: LIPI Press.
- Krismono, Krismono. 2017. "Salafisme Di Indonesia : Ideologi, Politik Negara, Dan Fragmentasi." *Millah* 16 (2): 173–202. <https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss>
- 2.art2.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1985. *Islam Dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Martin Van Bruinessen. 2013. *Rakyat Kecil Islam Dan Politik*. Yogyakarta: Gading.
- Munawir Sjadzali. 1993. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press.
- Muzammil, Iffah. 2013. "Global Salafisme Antara Gerakan Dan Kekerasan." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 3.
- Natsir, Muhammad. 1973. "Hakikat Agama Islam." In *Capita Selecta*, edited by D.P. Sati Alimin, 145–58. Jakarta: Bulan bintang.
- Ricklefs, M.C. 2013. *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi Jawa Dan Penentangannya Dari 1930 Sampai Sekarang*. Jakarta: Serambi.
- Sholehiddin, Moh. 2013. "Ideologi Religio-Politik Gerakan Salafi Laskar Jihad Indonesia." *Jurnal Review Politik* 03: 47–68.
- Solahudin. 2011. *NII Sampai Ji: Salafy Jihadisme Di Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Wahab, Abdul Jamil. 2019. "Membaca Fenomena Baru Gerakan Salafi Di Solo." *Dialog* 42 (2): 221–36.
- Wahid, Abdurrahman, ed. 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.